

Bulan Bahasa di Tahun Postmodernisme

Oleh **Ariel Heryanto**

Setiap Oktober, seperti bulan-bulan Oktober sebelumnya, ada sejumlah proyek dan ritual perayaan yang disebut Bulan Bahasa. Diskusi tentang bahasa dan sastra diadakan kurang lebih dengan semangat dan kerangka yang sama, yakni bagaimana memperlak bahasa/sastra sebaik-baiknya bagi apa yang disebut "Pembangunan."

Tapi di lingkungan intelektual Indonesia yang lebih luas, tahun 1993 ini agak khusus karena ditandai oleh memuncaknya "demam Postmodernisme". Perbincangan tentang isme ini sudah berawal beberapa tahun lalu, tapi intensitas perdebatannya belum pernah selalu dan seseru tahun ini. Hal itu dapat diamati di berbagai koran dan forum diskusi.

Demam postmodernisme ini membantu menunjukkan kepada kita apa yang tidak beres dalam "Garis-garis Besar Haluan" studi bahasa/sastra di Indonesia selama ini. Bangkitnya demam postmodernisme ini menjadi cambuk yang diperlukan bagi para pecinta ilmu bahasa dan sastra. Ia menyadarkan kita betapa mubazirnya format dan wawasan resmi yang mematok acara-acara Bulan Bahasa selama beberapa tahun ini. Di awal demam postmodernisme ini para pecinta kajian bahasa dan sastra Indonesia berpeluang memberikan sumbangan yang jauh lebih serius dan bersejarah bagi perkembangan masyarakat ini ketimbang sekadar menjadi tukang bongkar-pasang onderdil bahasa dalam mesin resmi Pembangunan.

Bahasa dalam modernisme kolonial abad 20

Sejarah kajian ilmiah tentang bahasa di Indonesia secara kasar dapat dikatakan sebagai sejarah pelecehan terhadap bahasa. Bahasa diperlukan pertama-tama dan yang terutama sebagai "alat" atau instrumen ("alat komunikasi").

Sebagai alat, bahasa dianggap bersifat netral. Ia baru bersifat baik atau tidak dalam praktik penggunaannya oleh pihak (agen) tertentu. Dengan demikian, dalam pandangan instrumental ini, si pengguna adalah subjek-subjek yang merdeka dan dengan bebas bisa menunggangi, memperlak, menjungkirbalikkan, atau secara kreatif menyusun bahasa indah.

Sebagai alat, harga bahasa ditentukan oleh nilaigunanya; kegu-

naan teknis-pragmatik-ekonomis. Dalam lingkungan sosial yang terkena demam Pembangunan, bahasa yang dianggap baik adalah bahasa yang resional, logis, sistematis, terpadu, hemat, standar. Singkatnya, bahasa yang baik adalah bahasa yang sangat kekar tetapi patuh (seperti matematika, mesin, buruh, atau anggota militer).

Dalam komunikasi sosial yang secara garis besar ditandai oleh kesenjangan sosial-politik-ekonomi-budaya-agama, maka bahasa adalah alat kekuasaan dalam reproduksi kesenjangan sosial itu. Aspek-aspek bahasa yang lain boleh, bahkan perlu dilecehkan, supaya tidak mengganggu "stabilitas & keamanan". Tidakkah aneh jika wawasan bahasa yang instrumental demi Pembangunan seperti itu baru dijumpai sebagai gejala besar pada masa bangkitnya kekuasaan sosial yang bernama Kolonialisme yang merupakan kerabat-kerja Kapitalisme.

Dalam masyarakat pra-kolonial dan pra-kapitalis, bahasa tak pernah dilecehkan secara sekuler sekadar sebagai "alat komunikasi". Tapi hal itu, bukannya tidak ada masalah keterasingan manusia. Bahasa saat itu memang tak dilecehkan, tapi sebaliknya justru dipuja-puja dan ditakuti. Bahasa tidak di-manusiawi-kan atau di-sosial-kan. Akibatnya terjadi "mistifikasi" mengenai kekuatan magis kata-kata lisan atau pun tulisan: bobot nama, nama keramat, mantera, aksara bertuah, dsb.

Pengarang kolonial, text nasional

Pembentukan tradisi studi ilmiah tentang kebahasaan di masyarakat kita tidak dapat dilepaskan dari (a) sejarah pembentukan Bahasa Indonesia sebagai "alat" kolonialisme, maupun (b) struktur kekuasaan masyarakat-negara Kolonial itu sendiri. Sejarah itu panjang dan kompleks. Tapi bagian yang paling penting terjadi pada awal abad 20 ini, sesudah kompleksitas modernisme Eropa dari abad-abad sebelumnya direduksi dan dijinakkan pada tingkat global. Bagian penting lain dari sejarah itu terjadi di tingkat nasional sesudah runtuhnya Demokrasi Terpimpin Sukarno dan bangkitnya Pembangunan kapitalisme.

Apa yang terjadi di Indonesia hari ini adalah sambungan langsung dari sejarah tersebut. Misal, tampilnya lembaga yang me-

ngatur "pembinaan dan pengembangan" bahasa. Sibuknya konsultasi tentang bahasa yang "baik dan benar". Adanya Bulan Bahasa dan sejumlah acara sayambara atau diskusi pada bulan itu yang semuanya dipatok oleh sebuah *master-discourse* yang instrumentalis: "Pembangunan sebagai Panglima" (lepas landas, sumber daya manusia, PJPT II, dsb.).

Apa yang kini secara resmi disebut sebagai bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang tadinya tumbuh di Nusantara atau di kalangan rakyat Pulau Riau, seperti sering dipropagandakan penguasa kolonial dan cendekiawan post-kolonial. Bahasa Indonesia lahir seperti Frankenstein atau Zombie: dari laboratorium rekayasa para ahli modernis!

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dibikin oleh sebuah panitia pimpinan van Ophuysen, beranggotakan para ahli kolonial

seperti koloni Hindia-Belanda, adalah sebuah ciptaan "bersama" tuan dan kawula kolonial.

Pada tahun 1918 Pemerintah penjajah membangun Balai Pustaka. Lembaga ini menciptakan dua hal lain yang tak kalah pentingnya. Yang pertama ialah penolakan: apa yang tidak boleh dibilang Bahasa Indonesia, yakni "Melayu pasar", bahasa yang hidup dalam masyarakat. Kedua, lembaga ini menciptakan apa yang selama 80 tahun ini dikenal sebagai khasanah resmi kesusastran nasional Indonesia! Tentu saja ini dikerjakan sambil menyangkal dan menyingkirkan khasanah sastra yang hidup dalam masyarakat dan dibilang sebagai "bacaan liar" (mungkin terjemahannya dalam bahasa Orde Baru: "BPK", Bacaan Pengacau Keamanan).

Banyak detail dari kisah awal abad itu yang menarik. Tapi pada kesempatan ini hanya ada dua

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

yang diangkat pemerintah Hindia Belanda. Memang untuk membikin bahasa ini, panitianya tidak hanya onggang-onggang di kamar lalu mengumbar lamunan sebagai modal kerja. Mereka mengadakan studitur ke beberapa wilayah yang dianggap sebagai sumber ilham (termasuk Sumatera dan Riau). Tapi pada akhirnya, bahasa yang mereka rumuskan adalah ciptaan para sinyo kolonial ini.

Bandingkan kerja mereka dengan kreativitas antropolog kolonial Belanda yang menciptakan "hukum adat" dan "kepribadian khas Timur" (harmoni, gotong-royong, kekeluargaan, spiritual) yang kini dibangga-banggakan birokrat Orde Baru sebagai tameng menampik tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia dari luar negeri. Atau bandingkan dengan kerja antropolog Amerika dalam menciptakan "Abangan-Priyayi-Santri" Jawa di zaman Orde Baru.

Teritori pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah menciptakan "tanah air" Indonesia. Pendidikan, transportasi, dan media massa kolonial menciptakan butir ketiga yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda: Bahasa Indonesia. Post-koloni "Indonesia",

pokok serius yang perlu kita cermati. Pertama, bahasa untuk sebuah bangsa dianggap *dapat, sebaiknya* melahan *seharusnya* dibikin sama dengan "alat-alat" pembangunan yang lain: lokomotif, peniti, atau dongkrak.

Kedua, seluruh proyek rekayasa masyarakat dan sejarah masa depannya yang telah dirintis Hindia Belanda itu berlanjut pada masa ini. Malahan lebih seru dan dengan entusiasme meledak-ledak. Balai Pustaka masih ada, walau melapuk. Tapi perannya digantikan Pusat Pembinaan dan Bahasa.

Di jaman kolonial dulu Balai Pustaka diadakan sebagai pabrik propaganda pemerintah untuk menandingi karya-karya kaum nasionalis ("bacaan liar"). Kini, bacaan yang ditabukan bukan hanya ditandingi dengan bacaan propaganda, tapi dilarang beredar dan dibakar, Anak muda yang memiliki, mendiskusikan atau mengedarkan bacaan terlarang dituduh subversif oleh aparat hukum dan militer serta dipenjara selama tujuh sampai delapan tahun. Hukuman seberat ini tidak terbayangkan di benak zaman kolonial.

Kita amat pecehan bahasa secara tahunan pada Bulan Bahasa, justru saat bahasa dimaksud-

kan untuk dihormati. Pada Bulan Bahasa kita diajak menonton orang yang dianggap pakar bahasa/sastra dan penguasa negara mempertanyakan habis-habisan nilai-guna Bahasa Indonesia sebagai alat Pembangunan. Ibarat bertanya: apa sumbangan sekuntum mawar bagi pembangunan sebuah waduk? Kapan kita diskusi, apa peran/sumbangan Pembangunan bagi bahasa/sastra dan rakyat, termasuk pelacur dan gelandangan?

Lihatlah thema berbagai acara Bulan Bahasa dari tahun ke tahun. Lihatlah, berapa banyak (dan mengapa) birokrat negara diundang menjadi pembicara dalam forum terhormat seperti Kongres Bahasa 1993.

**Gelombang postmodernisme:
Revolusi bahasa sastrawi**

Di masyarakat yang terbenam dalam tata-berpikir teknokratik, instrumentalis, developmentalis dan modernis akhir abad 20 ini, jelas kesusastraan tidak akan pernah dihargai. Adakah periode lain dalam seluruh sejarah masyarakat kita ini di mana kesusastraan dilecehkan atau diabaikan seperti pada jaman Pembangunan, sepelempat abad terakhir ini? Masih lumayan bahasa direduksi sebagai "alat". Masih lumayan bahasa diperhatikan karena dianggap berguna dalam komunikasi Pembangunan. Tapi sastra? Sebagai "alat" pun sulit diharapkan! Sastra bagaikan kaum pariah atau anak-jadah. Ia dianggap anak liar.

Untunglah pelecehan atas bahasa dan penindasan terhadap sastra yang bertahun-tahun itu kini menghadapi gugatan besar dari postmodernisme. Bahasa tidak sekadar dinaikkan martabatnya sebagai "alat" yang lebih baik atau terbaik bagi apa pun dan siapa pun. Tapi juga bahasa tidak diperalat apa pun atau siapa pun. Bahasa dan kajian bahasa menjadi sumber ilham utama atau pusat wilayah dari seluruh sejarah pergolakan sosial.

Dalam wawasan postmodernisme, kehidupan kita pada intinya berpusat pada pergulatan dengan representasi atas realita. Lebih tepatnya lagi, pergulatan dengan representasi atas rangkaian realitas. Kisah kehidupan kita "dibaca" sebagai bentangan aneka teks puitik. Karena itu tidak aneh jika kajian tentang bahasa dan sastra menjadi salah satu "tanah-air"

kelahiran post-modernisme. Hingga kini kajian bahasa/sastra menjadi salah satu "ratu" utama dalam kajian postmodernis tentang hampir seluruh tata kehidupan sosial kita (politik, ekonomi, hukum, antropologi, filsafat, arsitektur, sejarah, atau ilmu jiwa). Para sarjana sosial tidak dapat mengabaikan kajian-kajian bahasa/sastra postmodernis. Bahkan mungkin wajib berguru.

Postmodernisme memang mencakup berbagai pengertian yang majemuk dan seringkali tumpang-tindih atau bahkan bertolak-belakang. Persis seperti halnya modernisme sebelum direduksi dan dijinakkan seusai Perang Dunia II. Pada kesempatan ini, kita memfokuskan perhatian pada salah satu tonggaknya yang terpenting yakni post-strukturalisme, yang juga menjadi kampung-halaman kajian bahasa dan sastra abad 20.

Ironinya, di Indonesia seluruh gelombang demam postmodernisme ini berlangsung hampir-hampir tanpa melibatkan tokoh-tokoh dalam bidang bahasa dan sastra! "Semestinya" (kalau ada yang boleh dimestikan dalam sebuah penalaran seperti itu) para sarjana bahasa/sastra kitalah yang menjadi perintis di garda-depan gelombang postmodernisme ini. Dan Bulan Bahasa, apalagi Kongres Bahasa, sepantasnya menjadi festival "postmodernisme"!

Mengapa keganjilan itu terjadi? Mungkin orang boleh curiga: jangan-jangan para ahli bahasa/sastra kita memang patut dipertanyakan keahliannya. Mungkin mereka lebih pantas disebut sebagai teknisi Pembangunan di bidang bahasa. Mungkin para intelektual muda Indonesia yang kini sibuk berpostmodernisme walau belum lulus S1, merupakan pembaharu dalam kajian bahasa/sastra yang lebih dapat diharapkan bagi masa depan Indonesia! Jangan lupa, modernisme pada awalnya juga merupakan pemberontakan radikal kaum terpelajar dan seniman muda.

Apa atau bagaimana persisnya gerak-gerik kerja subversif kaum postmodernis? Mengapa bahasa/sastra menjadi primadonanya? Sekali lagi, yang dapat dan perlu digambarkan di sini hanya sekeping versi yang bersifat sempalan, sangat simplistik, dan reduktif. ■

Ariel Heryanto,
staf pengajar UKSW, Salatiga